

**TESIS**

**PARTISIPASI ORGANISASI PEMUDA KEDAERAHAN DALAM  
PEMBANGUNAN DAERAH**

(STUDI TERHADAP ORGANISASI KESATUAN PELAJAR MAHASISWA  
PINRANG DI KABUPATEN PINRANG)

Disusun dan diajukan oleh

**ALIM HAKIM MAHMUD  
P022181020**



**PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN  
WILAYAH/MANAJEMEN KEPEMIMPINAN PEMUDA  
SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS  
HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**PARTISIPASI ORGANISASI PEMUDA KEDAERAHAN DALAM  
PEMBANGUNAN DAERAH  
(STUDI TERHADAP ORGANISASI KESATUAN PELAJAR MAHASISWA PINRANG DI  
KABUPATEN PINRANG)**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi  
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Disusun dan Diajukan Oleh

ALIM HAKIM MAHMUD

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020

**TESIS**

**PARTISIPASI ORGANISASI PEMUDA KEDAERAHAN DALAM  
PEMBANGUNAN DAERAH  
(STUDI TERHADAP ORGANISASI KESATUAN PELAJAR  
MAHASISWA PINRANG DI KABUPATEN PINRANG)**

Disusun dan diajukan oleh

**ALIM HAKIM MAHMUD**  
Nomor Pokok P022181022

telah di pertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
pada tanggal 2 September 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat



Menyetujui

Komisi Penasehat,

Prof. Dr. H. Muhammad Asdar, SE, M.Si.  
Ketua

Prof. Dr. Syamsu Alam, SE, M.Si  
Anggota

Ketua Program Studi  
Perencanaan dan Pengembangan  
Wilayah

Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng



Dekan Sekolah Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Alim Hakim Mahmud  
NIM : P022181020  
Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah /  
Manajemen Kepemimpinan Pemuda

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 26 Agustus 2020

Yang menyatakan

A 6000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila logo and the text "METERAI TEMPEL", "6000 ENAM RIBU RUPIAH", and a unique serial number "645DBAHF737708296".

**Alim Hakim Mahmud**

## PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sang maha segalanya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Tesis ini berjudul “Partisipasi Organisasi Pemuda Kedaerahan dalam Pembangunan Daerah (Studi terhadap Kesatuan pelajar Mahasiswa Pinrang di Kabupaten Pinrang)”. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua Orangtua Bapak Drs. H. Mahmud Bandu M.Si. dan Ibu Dra. Hj. Sumiati Sa’ban Miru serta kedua kakak Khairil Akbar S.pd dan Husnaeni Mahmud.ST yang telah merawat penulis dengan kasih sayang penuh cinta doa yang tiada henti dan senantiasa memberikan tuntunan hidup serta kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang terbaik. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Muh. Asdar. SE.,M.Si sebagai ketua komisi penasihat dan Prof. Dr. Syamsu Alam.SE., M.Si sebagai anggota komisi penasihat atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan berupa ilmu pengetahuan, nasehat dan saran dalam penulisan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada Prof. Dr. Muh. Asdar. SE.,M.Si dan Prof. Dr. Syamsu Alam.SE., M.Si selaku pembimbing yang meluangkan waktu untuk memberikan masukan dalam penulisan ini
2. Tim penguji tesis Prof.Dr.Musran Munizu,SE.,M.Si. Dr. Maat Pono, M.Si dan Dr. Abdul Razak Munir,SE.,M.Si., Mktg telah memberikan saran dan kritik dalam penyelesaian tesis

3. Kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga republik Indonesia ,telah memfasilitasi penulis untuk study magister
4. Bapak bupati Kabupaten Pinrang beserta jajarannya telah meluangkan waktu untuk berdiskusi mengenai pembangunan di kabupaten Pinrang
5. Teman-teman di organisasi KPMP telah memberikan dukungan yang luarbiasa kepada penulis
6. Teman-teman Angkatan 2018 Perencanaan dan Pengembangan wilayah/Manajemen kepemimpinan pemuda

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis.

Makassar , 26 Agustus 2020

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Teoritis.....	12
1. Pemuda.....	12
2. Pembangunan.....	15
3. Pembangunan Daerah.....	21
4. Partisipasi Pemuda.....	24

B. Penelitian Terkait.....	26
C. Kerangka Berpikir.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Sumber dan Jenis Data.....	32
E. Instrumen Penelitian.....	33
F. Defenisi Operasional.....	33
G. Teknik Pengumpulan Data.....	34
H. Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Kesatuan Pelajar Mahasiswa Pinrang.....	41
B. Gambaran Kabupaten Pinrang.....	50
C. Program Kerja KPMP dan Prioritas Pembangunan.....	54
D. Bentuk Partisipasi KPMP.....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir.....	28
Gambar 3.1. Lokasi Penelitian.....	31
Gambar 4.1 Bagan Struktur Kepengurusan KPMP.....	41
Gambar 4.2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pinrang.....	53

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1. Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang.....	64
Tabel 4.2. Program Kerja KPMP.....	66
Tabel 4.3. Partisipasi KPMP.....	74

## ABSTRACT

**ALIM HAKIM MAHMUD.** *The Participation of Regional Youth Organizations in Regional Development, (Study of the Pinrang Student Associations in Pinrang District),* (supervised by **Muh. Asdar** and **Syamsu Alam**).

This study aims to determine the participation of the Pinrang Student Union towards development in Pinrang Regency.

The research was conducted in Pinrang Regency using a descriptively qualitative approach. The determination of informants used a purposive sampling method. Data collection used interview and FGD methods. The data analysis technique used was an interactive model, data reduction, data presentation, and inference.

This study shows that the participation of Pinrang student unions in development in Pinrang district is only found in developing human resources, such as in the education sector, leadership training, social control, while in social control generally youths have not been directly involved in the development in various sectors due to various obstacles, namely the absence of a forum for youth to participate directly in regional development, the management of KPMP from the center to branches and cooperatives has not been perfect so that it hinders the organizational process, There is no help from alumni who occupy positions to open a forum to allow KPMP participate in development, there is no binding regulation so that youths do not have a role in regional development.

**Keywords.** Barriers, Regional Organization, Role, Youth.



## ABSTRAK

**ALIM HAKIM MAHMUD.** *Partisipasi Organisasi Pemuda Kedaerahan dalam Pembangunan Daerah (Studi terhadap Organisasi Kesatuan Pelajar Mahasiswa Pinrang di Kabupaten Pinrang)* (dibimbing oleh Muh. Asdar dan Syamsu Alam).

Penelitian ini bertujuan mengetahui partisipasi Kesatuan Pelajar Mahasiswa Pinrang terhadap pembangunan di Kabupaten Pinrang.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pinrang dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sampel penelitian digunakan metode penyampelan purposif untuk penentuan informan, Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan FGD. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif, pereduksian data, penyajian data, dan penyimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi kesatuan pelajar mahasiswa Pinrang terhadap pembangunan di Kabupaten Pinrang adalah hanya pada pengembangan sumber daya manusia pada sektor pendidikan, pelatihan kepemimpinan, sosial kontrol yang secara garis besar pemuda belum terlibat secara langsung dalam pembangunan di berbagai sektor. Hal ini disebabkan berbagai macam hambatan yakni tidak adanya wadah bagi pemuda untuk turut serta langsung dalam pembangunan daerah, belum sempurna kepengurusan dari KPMP mulai dari pusat hingga cabang dan koperti sehingga menghalangi proses organisasi, tidak adanya bantuan alumni yang menduduki jabatan guna membuka wadah agar KPMP bisa berpartisipasi pada pembangunan, tidak adanya regulasi yang mengikat agar supaya pemuda memiliki peran dalam pembangunan daerah.

Kata kunci: Hambatan, Organisasi Kedaerahan, Peran, Pemuda.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Mulai dari memerdekakan diri menjadi sebuah bangsa hingga perkembangan peradaban bangsa pada masa depan tentu tidak lepas dari partisipasi kaum muda didalamnya. Kehadiran bangsa Indonesia dari proses kemerdekaan hingga menjadi sebuah bangsa yang berkembang tidak lepas dari kerja keras yang tak patah semangat dari Pemuda Indonesia. Tercatat dalam sejarah dimulai dari perlawanan para santri pesantren dalam melawan penjajah hingga bergeraknya kaum muda dalam naungan organisasi BUDI UTOMO tahun 1908 dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Beberapa tokoh pemuda yang tercatat dalam sejarah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia seperti Bung Tomo, KH. Hajar Dewantara hingga generasi pelanjutnya seperti Ir. Sukarno, Bung Hatta serta Sultan Syahrir, Jendral Sudirman. Mereka mengeluarkan semua potensi gagasan serta fisik dalam melakukan perjuangan. Partisipasi pemuda dalam melakukan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia sama sekali tidak kenal lelah serta ikhlas dalam berjuang.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, control

sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Pemuda memiliki peran sebagai agen perubahan, stackholder pengontrol social serta pejuang moral dalam berkehidupan bangsa dan bernegara. Artinya pemuda memiliki fungsi yang sangat substantif dalam membangun keberlanjutan peradaban sebuah bangsa. Pemuda diharapkan dapat menjadi pelopor kemajuan bangsa Indonesia dalam hal pembangunan wilayah daerahnya hingga berujung pada pembangunan nasional.

Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global (Tap. MPR No. IV/MPR/1999). Dalam mengimplementasikan pembangunan nasional senantiasa mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kokoh, baik kekuatan moral maupun etika bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan nasional, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social (UUD 1945).

Sedangkan Pembangunan daerah merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya untuk menghadapi keterkaitan dan ketergantungan aspek fisik, lingkungan dan social ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah untuk berkelanjutan. Agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan memberikan hasil dan daya guna yang efektif bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia maka pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada perencanaan yang terprogram secara bertahap dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah merancang suatu perencanaan pembangunan yang tersusun dalam suatu Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), dan mulai Repelita VII diuraikan dalam suatu Repeta (Rencana Pembangunan Tahunan), yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur tentang beberapa Propenas (Program Pembangunan Nasional). Rancangan APBN tahun 2001 adalah Repeta pertama dari pelaksanaan Propenas yang merupakan penjabaran GBHN 1999-2004, di samping merupakan tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Pemuda memiliki peran dalam mengisi semua aspek kemajuan bangsa. Pemuda diharapkan dapat menjadi generasi pelanjut dalam mencapai cita-cita bangsa. Karakteristik pemuda yang labil tentunya menjadi masalah yang harus segera diselesaikan oleh daerah maupun negara.

Pembentukan organisasi atau komunitas bidang pemuda adalah bentuk implementasi bahwa harapan bangsa dan daerah tergantung pada generasi muda yang ada. Kehadiran seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI dan beberapa organisasi kepemudaan adalah proses dilakukannya pembangunan sumber daya manusia muda guna menjadi pelanjut tongkat estafet pembangunan nasional maupun daerah. Tentunya diharapkan bahwa organisasi kepemudaan mesti melakukan partisipasi secara penuh dalam pembangunan seperti yang dijelaskan sejarah. Artinya melalui proses kelompok, pemuda diharapkan bisa melakukan sumbangsi langsung setiap *stackholder* kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran Organisasi Kepemudaan (OKP) masih terbatas dalam Pelayanan Kepemudaan serta pembangunan karakter pemuda. Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan masih rendah. Sebagian besar organisasi kepemudaan fokus di bidang politik, terlalu nyaman dengan tarik menarik kekuasaan atau bahkan dualisme. Organisasi Kepemudaan hanya dijadikan sebagai wadah untuk menguasai dana hibah yang laporannya sebagian besar dimanipulasi. Permasalahan inilah yang mengakibatkan tersendatnya kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda dikarenakan sikap apatisisme massal yang dialami pemuda melihat citra negatif Organisasi Kepemudaan. Pelaksanaan pelayananan kepemudaan lintas sektor belum sinergi. Seluruh *stakeholder* kepemudaan belum benar-benar sinergitas dan membangun soliditas untuk kejayaan pemuda.

Di sisi lain, beberapa persoalan kepemudaan yang terkait dengan peran sosial masih memerlukan perhatian. Kondisi pemuda saat ini antara lain persoalan kurangnya minat baca di kalangan pemuda, yaitu 37,5%; serta minimnya sarana dan prasarana kepemudaan juga merupakan faktor yang turut memperbesar masalah kepemudaan. Belum lagi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda pada tahun 2014, tercatat bahwa tingkat pengangguran pemuda di Indonesia yang mencapai angka 14,97 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata dari setiap 100 orang pemuda angkatan kerja, sebanyak 15 pemuda diantaranya pengangguran atau belum mempunyai pekerjaan. Wajah Indonesia akan terancam tergores dalam 10 tahun lagi apabila masalah-masalah yang terurai diatas tidak langsung diambil langkah-langkah perbaikan.

Hanya meningkat setengah poin IPP, Sulawesi Selatan tergolong dalam kelompok 'Lima Terbawah' pembangunan pemuda pada 2016. Keadaan ini menunjukkan, relatif terhadap di provinsi-provinsi lainnya, pembangunan pemuda di provinsi ini kurang terakselerasi. Domain pendidikan serta gender dan diskriminasi tidak menunjukkan perubahan indeks. Sementara itu, domain kesehatan dan kesejahteraan justru menurun kinerjanya dalam 2015-2016. Dalam domain ini, indikator pemuda korban kejahatan dan kehamilan remaja memburuk. Nilai subindeks indikator yang pertama turun satu poin dari poin delapan ke poin tujuh, sebagaimana juga nilai sub-indeks indikator yang kedua, dari poin tujuh ke poin enam. Dalam

domain lapangan dan kesempatan kerja terjadi kenaikan indeks. Kendati salah satu indikatornya pemuda wirausaha (whitecollar) mengalami penurunan kinerja. Indikator lainnya tingkat pengangguran justru membaik. Pemuda wirausaha turun cukup dalam dari 0,35 persen ke 0,04 persen. Keadaan ini dapat dikompensasi oleh penurunan pengangguran dari 15 persen menjadi 11 persen. Resultan dua keadaan ini membentuk perubahan positif indeks domain lapangan dan kesempatan kerja dari 35 menjadi 40 poin. Sulawesi Selatan sepatutnya dapat jauh lebih baik daripada keseluruhan capaian ini, mengingat dalam Indeks Pembangunan Manusia provinsi ini justru lebih berkinerja (BAPPENAS,2017). Masalah pemuda diatas mestinya diselesaikan melalui proses organisasi kepemudaan yang ada dimasing daerah dalam rangka melakukan proses pembentukan karakter pemuda yang berkualitas.

Salah satu organisasi kepemudaan tingkat daerah adalah kesatuan pelajar mahasiswa Pinrang atau yang disingkat KPMP. Organisasi ini hadir guna membimbing usia pemuda yang berstatus pelajar dan mahasiswa. Organisasi ini adalah organisasi kepemudaan yang berada pada tingkatan kedaerahan yaitu berada pada naungan Kabupaten Pinrang atau lebih sering dikenal sebagai organisasi kedaerahan. KPMP diharapkan menjadi wadah pelajar dan mahasiswa asal Kabupaten Pinrang dalam melakukan proses dan pembentukan diri yang akan melakukan pembangunan didaerahnya. KPMP menjadi organisasi yang harus selalu melakukan inovasi dalam rangka

pembangunan daerahnya. Tetapi melihat kondisi sekarang KPMP justru memperlihatkan proses kebalikan dari niatan pembentukannya. KPMP terkesan tidak menjalankan fungsinya sebagai gandar gagasan dalam pembangunan daerah. Yang terlihat justru KPMP terkesan apatis dalam menjalankan fungsinya. Hal ini menjadi masalah yang mestinya diselesaikan sehingga akan terjadi mitra yang baik dari pemerintah daerah dan KPMP. Setelah dilakukan proses observasi awal dengan kepala dinas Pariwisata pemuda dan olahraga (DISPASPOR) didapatkan bahwa tidak adanya data yang tertulis dalam mengukur tingkat partisipasi organisasi kepemudaaan dikabupaten pinrang terhadap pembangunan daerahnya khususnya organisasi kesatuan pelajar mahasiswa Pinrang. Sebaliknya OKP yang ada justru meminta arus timbal balik terhadap tanggung jawab pemerintah terhadap pengembangannya. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan kondisi ideal pemuda dan organisasi kepemudaaan yang tercatat dalam perundang-undangan.

Diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang ORMAS bahwa organisasi kemasyarakatan bertujuan meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa; melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika dan budaya yang hidup dalam masyarakat; melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi

dalam kehidupan bermasyarakat menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Berkaitan dengan ini maka secara otomatis KPMP yang merupakan organisasi daerah kabupaten Pinrang memiliki tanggung jawab dalam hal pelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta aspek-aspek pembangunan daerah lainnya. Pada kenyataannya Kesatuan Pelajar Mahasiswa Pinrang dalam hal meramu sebuah program kerja tidak selalu merujuk pada tujuan pembangunan daerah serta rancangan strategis pembangunan daerah yang telah dibentuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan pada deskripsi diatas maka saya mengambil judul "Partisipasi Organisasi Pemuda Kedaerahan dalam Pembangunan Daerah. (Studi terhadap organisasi Kesatuan Pelajar Mahasiswa Pinrang di Kabupaten Pinrang). Agar kiranya menjadi bahan kajian dalam hal partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan daerah di kabupaten Pinrang serta menjadi perampungan data tentang tingkat partisipasi pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerahnya khususnya kabupaten Pinrang. Sehingga terjadi perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik demi kemajuan daerah melalui mitra kerja organisasi pemuda dan pemerintah daerah.

## **B. Identifikasi masalah**

1. Tidak adanya data tertulis tentang partisipasi organisasi kepemudaan di kabupaten Pinrang sehingga dianggap sulit untuk mengukur tingkat partisipasi pemuda pada pembangunan daerah.
2. Kabupaten Pinrang memiliki jumlah pemuda yang tinggi yang dapat mengelola keseluruhan sumber daya yang ada di kabupaten demi pembangunan daerah. Akan tetapi pemuda baik individu maupun organisasi memiliki partisipasi yang minim dalam pembangunan daerah. Serta kurangnya wadah bagi pemuda dalam menyampaikan gagasan serta tindakannya dalam turut aktif dalam pembangunan daerah.

## **C. Batasan Masalah**

Batasan Masalah penelitian ini adalah partisipasi Kesatuan Pelajar Mahasiswa Pinrang terhadap pembangunan kabupaten Pinrang. Pembangunan yang dimaksud adalah bentuk perkembangan dan perubahan dari realitas yang sudah ada sebelumnya.

## **D. Rumusan Masalah**

Berikut yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian :

1. Bagaimana Partisipasi Kesatuan Pelajar Mahasiswa Pinrang dalam pembangunan Kabupaten Pinrang ?

2. Apa factor yang menjadi hambatan Kesatuan Pelajar Mahasiswa Pinrang dalam berpartisipasi pada pembangunan di kabupaten Pinrang ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui partisipasi pemuda dalam pambangunan daerah melalui organisasi Kesatuan Pelajar Mahasiswa Pinrang dalam pambangunan di kabupaten Pinrang.
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Kesatuan Pelajar Mahasiswa Pinrang dalam melaksanakan pambangunan di kabupaten Pinrang.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Praktis

Tulisan ini adalah sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar magister (strata dua) dibidang Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan menjadi referensi tentang peran pemuda dalam pambangunan dan pemanfaatan potensi menjalankan fungsi sebagai agen perubahan di Kabupaten Pinrang.

2. Kegunaan akademis

Sebagai akademisi, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan rujukan perumusan rencana strategis yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan

pembangunan daerah yang melibatkan pemuda secara umum dan organisasi pemuda secara khusus.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teoritis**

##### **1. Pemuda**

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang. Sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Secara internasional, WHO menyebut sebagai "young people" dengan batas usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut "adolesceneae" atau remaja. International Youth Year yang diselenggarakan tahun 1985, mendefinisikan penduduk berusia 15-24 tahun sebagai kelompok pemuda. Pemuda adalah Individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural.

Menurut peraturan perundang-undangan No. 40 tahun tentang kepemudaan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter,

kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, serta kepeloporan pemuda. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partisipasi

pemuda merupakan keterlibatan pemuda dalam suatu kegiatan, baik keterlibatannya melalui tenaga, pikiran dan biaya. Jika dilihat dari konteks pembangunan daerah maka yang dimaksud dengan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah adalah keterlibatan pemuda baik secara fisik maupun non fisik secara bersama-sama dengan aktor yang lain dalam usaha membangun daerah. Siagian mengatakan bahwa pemuda sebagai generasi penerus bagi pembangunan, maka mereka perlu diikutsertakan dalam memikirkan, merencanakan dan memutuskan apa yang hendak dibangun oleh karena itu dalam setiap pertemuan atau rembuk yang diadakan unsur pemuda untuk diminta pendapat dan saran mereka serta diperhatikan. Pembangunan merupakan sebuah proses mencapai kemajuan kehidupan masyarakat. Dalam study sosiologis pembangunan mempunyai beberapa azas untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan. Diantaranya kekayaan rata-rata pemerataan, kualitas hidup, kerusakan lingkungan serta keadilan sosial dan kesinambungan. Dengan demikian pembangunan seringkali diartikan sebagai upaya untuk mencapai kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan.

Setiawan, dkk (2014) mengemukakan bahwa pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, karena peranannya sebagai aktor pembangunan. Berbekal kemampuan dan kecakapannya, potensi

pemuda mampu menjadi bagian dalam proses pembangunan yang mandiri, kreatif dan berkomitmen. Dengan demikian, pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. Pembangunan

Pembangunan merupakan sebuah proses mencapai kemajuan kehidupan masyarakat. Dalam study sosiologis pembangunan mempunyai beberapa azas untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan. Diantaranya kekayaan rata-rata pemerataan, kualitas hidup, kerusakan lingkungan serta keadilan sosial dan kesinambungan. Dengan demikian pembangunan seringkali diartikan sebagai upaya untuk mencapai kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam pembangunan sebuah negara harus melakukan spesialisasi produksi-produksi sesuai keunggulan komparatif yang dimilikinya. dengan demikian akan terjadi perputaran ekonomi internasional melalui pembagian kerja secara international dengan adanya pembagian kerja international akan melahirkan dua kelompok negara, yaitu negara yang memproduksi hasil

pertanian dan negara yang memproduksi barang industri. Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan (Siagian,1994). Sedangkan pada penjelasan ekonomi yang asli mengatakan bahwa usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Demikian terjadi pembangunan di segala aspek kehidupan masyarakat ekonomi, sosial, budaya dan politik dan berlangsung pada level makro dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan atau perbaikan pertumbuhan dan diverifikasi. Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok; pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material; pembangunan harus menciptakan kondisi-kondisi manusia bisa mengembangkan kreatifitasnya.

Selanjutnya pada tahap perencanaan pembangunan perspektif dan tahunan yakni menurut undang-undang no.25 tahun 2004 tentang

sistem perencanaan pembangunan nasional pasal 1 ayat 3 sistem perencanaan pembangunan nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka poanjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah, istilah perencanaan perspektif atau perencanaan jangka panjang biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun pada hakikatnya rencana perspektif adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu panjang. Namun pada kenyataannya tujuan dan sasaran luas tersebut harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan membagi rencana perspektif itu kedalam beberapa rencana jangka pendek atau tahunan.

Pembangunan daerah, menurut Lincoln Arsyad dalam bukunya yang berjudul perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah, pengertian daerah berbeda-beda tergantung aspek ditinjauanya pada aspek ekonomi daerah memiliki tiga pengertian adalah (Arsyad,1999:107-108):

- a. Suatu daerah dianggap sebagai ruang diamana kegiatan ekonomi terjadi di daerah dan didalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapitanya, budayanya, geografisnya dan lainlainya dalam hal ini disebut daerah homogen.

- b. Daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi yang disebut daerah modal.
- c. Suatu daerah merupakan suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten, kecamatan dan lain-lainya yang termasuk adalah pada pembagian administrasi suatu negara. Disebut sebagai daerah perencanaan atau daerah administrasi.

Ekonomi daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya yang harus mampu menaksir potensi sumberdaya yang diperlukan dalam merencanakan dan membangun perekonomian daerah. Pembangunan daerah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah

Bentuk pembangunan daerah, pada umumnya pembangunan desa berbentuk pembangunan fisik dan pembangunan non fisik atau mental spiritual, pembangunan fisik dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana: jembatan, gotong royong kebun percontohan, MCK, sarana ibadah dan lainnya. Sedangkan pembangunan non fisik berupa pemberian kursus penyuluhan tentang kesehatan, kewirausahaan, penyuluhan tentang hidup sehat dan lainnya. Pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan(Lewwellwn,1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup paradig teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori mikro tentang nilai individu yang menunjang proses perubahan. Pradigma keteergantungan mencakup teori keterbelakangan, ketergantungan dan sistem dunia sesuai dengan klasifikasi Larrain(1994). Sedangkan Tikson(2005) membaginya kedalam tiga klasifikasi teori pembangunan yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan.diberbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan. Para ahli memberikan definisi tentang pembangunan yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu denan daerah lainnnya. Negara satu dengan yang lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa

pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan(Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah,2005).

Indikator dan variable pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di Negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indicator pembangunan akan bergeser kepada factor-faktor sekunder dan tersier (Tikson, 2005).

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai factor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengkombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan knowledge, attitude dan skills, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

### 3. Pembangunan Daerah

Dalam dinamika pembangunan ekonomi daerah, salah satu aspek yang perlu diperhitungkan adalah kemampuan untuk memanfaatkan atau menggunakan sumber daya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam – seefektif dan seefisien mungkin. Kemampuan dalam mengalokasikan dan memanfaatkan sumberdaya tersebut akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan ketersediaan sumberdaya dimaksud dengan kata lain, persediaan (dalam aspek kuantitatif) dan mutu sumberdaya (dalam aspek kualitatif) dan dimensi penggunaannya harus dirumuskan dalam suatu kerangka kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang bermutu, adil, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini merupakan filosofi utama dari makna otonomi daerah sebagaimana digariskan secara tegas dalam Undangundang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999.

Secara teknis, hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah tentu akan sangat tergantung dengan sejauhmana sumberdaya yang tersedia mampu dioptimalisasikan penggunaannya. Era otonomi daerah mengisyaratkan pula perlunya diadakan suatu pengkajian yang mendalam bersifat komprehensif tentang beragam potensi sumber daya yang tersedia, dan akan digunakan sebagai modal dasar utama untuk menggerakkan dan mendorong proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kecepatan dan optimalisasi

pembangunan wilayah (daerah) tentu akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas sumberdaya ekonomi. Keterbatasan dalam sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan dan sumberdaya sosial yang berkualitas dapat menimbulkan kemunduran yang sangat berarti dalam dinamika pembangunan ekonomi daerah. Konsekuensi lain yang ditimbulkan sebagai akibat terbatasnya kapasitas dan kapabilitas sumberdaya ekonomi yang dimiliki daerah adalah ketidakleluasaan daerah yang bersangkutan untuk mengarahkan program dan kegiatan pembangunan ekonominya, dan situasi ini menyebabkan munculnya disparitas pembangunan ekonomi wilayah. Kondisi ini tampaknya menjadi tak terhindarkan terutama bila dikaitkan dengan pelaksana otonomi daerah dewasa ini.

Dalam telaah teoritis, Anwar dan Hadi (1996) mengungkapkan bahwa salah satu penyebab munculnya ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah di Indonesia adalah adanya perbedaan dalam karakteristik limpahan sumberdaya alam (*resources endowment*) dan sumberdaya manusia (*human resources*) disamping beberapa faktor lain yang juga sangat krusial seperti perbedaan demografi, perbedaan potensi lokasi perbedaan aspek aksesibilitas dan kekuasaan (*power*) dalam pengambilan keputusan serta perbedaan aspek potensi pasar.

Dengan pola analisis sebagaimana diilustrasikan diatas dapat digarisbawahi bahwa pengelolaan, ketersediaan, dan kebijakan yang

tepat, relevan serta komprehensif amat dibutuhkan dalam kaitannya dengan percepatan proses pembangunan. Ekonomi daerah dan penguatan tatanan ekonomi daerah yang pada gilirannya dapat menjamin keberlanjutan proses pembangunan ekonomi dimaksud. Namun amat disayangkan, dinamika pelaksanaan pembangunan ekonomi dewasa ini, memiliki atau menampakkan suatu kecenderungan dimana daerah yang kaya akan sumberdaya ekonomi lebih cepat menikmati kemajuan pembangunan bila dibandingkan dengan wilayah lain yang miskin akan sumberdaya ekonomi dalam artian luas.

Apabila kondisi seperti ini terus berlanjut maka tidaklah terlalu mengherankan manakala isu antara wilayah (kawasan) yang merebak diakhir pembangunan jangka panjang tahap pertama yang lalu, kembali muncul dengan sosok yang semakin mengkhawatirkan. Sebagai ilustrasi, berikut ini dikutip pendapat seorang pakar yang banyak menyoroti tentang dinamika otonomi daerah: "...negara indonesia kaya akan sumberdaya alam, tetapi rakyatnya banyak yang miskin. Kenyataan paradoksal tersebut tentunya ada penyebabnya, anatara lain karena lemahnya pengelolaan manajemen sumber daya alam serta penguasaan oleh segelintir orang yang rakus.

Seiring dengan semangat desentralisasi, sebagian besar kewenangan pengelolaan sumberdaya alam sudah diserahkan kepada daerah, termasuk kewenangan didaerah otoritas seperti kawasan

kehutanan, kawasan pertambangan, kawasan pelabuhan dan lain sebagainya yang selama ini tidak tersentuh oleh kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (lihat pasal 129 UU Nomor 22 Tahun 1999). Bagaimana menggunakan sumberdaya alam untuk kepentingan rakyat banyak akan sangat tergantung pada kemauan politik (political will) dan tindakan politik (political action) dari pemerintah daerah". (Wasistiono, 2003)

#### 4. Partisipasi Pemuda

Definisi partisipasi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu "participation" adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana seseorang diikuti sertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan kewajibannya.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Akan tetapi, keputusan politik menyangkut dan mempengaruhi kehidupan

warga masyarakat maka warga masyarakat berhak mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi dalam PutraBudiardjo berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam Putra Budiardjomengatakan bahwa Partisipasi Politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris, "participation" yaitu pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Bornby dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:81) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk "mengambil bagian" yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Masih di dalam buku yang sama, menurut kamus sosiologi disebutkan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Mardikanto dan Soebiato, 2013:81). Dari beberapa definisi di atas, jika dilihat dari konteks pembangunan maka partisipasi dalam pembangunan berarti keikutsertaan atau keterlibatan dalam sebuah proses pembangunan.

## B. Penelitian Terkait

Penelitian terkait tentang partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dengan berbagai jenis serta focus penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian terkait akan dideskripsikan oleh tabel dibawah.

NO	Penulis & Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Isnadi (2007)	Proses perencanaan partisipatif dalam pembangunan di kabupaten Kebumen	Berdasarkan hasil penelitian diperoleh belum diberi jalan dalam mengemukakan gagasan atau masukan-masukan dari stakeholders, masih didominasi para elit politik yang berkuasa
2	Eni Sukmawati Indah (2017)	Organisasi Pemuda dalam Menciptakan Entrepreneurship	Membentuk komunikasi yang meliputi proses, pesan, jaringan keadaan saling bergantung hubungan dan lingkungan
3	Ramadhani (2018)	Peran Pemuda Dalam Pengembangan Wisata Pantai Lowita di Kabupaten Pinrang	Peran pemuda dalam mengembangkan wisata Pantai Lowita adalah dengan ikut berpartisipasi membersihkan pantai dari sampah-sampah yang menumpuk akibat angin barat, ikut terlibat dalam kegiatan yang diadakan pemerintah daerah serta mempromosikan wisata pantai kepada publik melalui unggahan foto dan video di media sosial. Adapun kegiatan diluar dari itu pemuda belum ikut terlibat dikarenakan kepemilikan Lowita dikelola oleh swasta, yang berarti bahwa keterlibatan pemuda cukup terbatas mengingat oleh pemilik lahan segala keperluan bagi pengunjung wisata diserahkan kepada pengelola yaitu keluarga pemilik lahan.
4	Kaslam (2007)	analisis potensi pemuda dalam pengembangan agribisnis kreatif di kabupaten Pinrang	hasil didapatkan bahwa potensi berwirausaha pemuda tergolong sedang
5	Apriyadi (2014)	partisipasi pemuda dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislative bagi para	Masih kurangnya kesadaran bagi para kaum muda dalam ikut serta pesta demokrasi

		pemilih pemula(studi kasus pemilu legislative tahun 2014 Desa Sidomulyo, Kabupaten Klaten	
6	Winda Soraya (2017)	Analisis Peran Pemuda Terhadap Pengembangan Wilayah	Peran dalam pembangunan diatas rata-rat 60% dalam hal sebagai penggerak, percepat pembangunan, motivator,innovator dan evaluator
7	Sulfiani (2020)	Peran gabungan pemuda pelajar mahasiswa barru dalam pembagunan di kabupaten barru	peran pemuda pelajar mahasiswa Barru dalam pembangunan daerah adalah hanya pada pengembangan sumber daya manusia pada sektor pendidikan secara khusus pelatihan kepemimpinan,sosial kontrol dan pengadaan kursus bagi calon mahasiswa untuk menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi negeri,yang secara garis besar pemuda belum terlibat secara langsung dalam pembangunan diberbagai sektor karena berbagai macam hambatan yakni kurangnya kerjasama antara pengurus organisasi daerah gabungan pemuda pelajar mahasiswa barru(GAPPEMBAR) dengan alumni-alumni Gappembar yang memiliki kedudukan dalam pemerintahan, masih kurangnya kepercayaan pemerintah terhadap potensi yang dimiliki pemuda Gappembar sehingga belum diberi kesempatan bagi mereka ikutserta dalam perencanaan,pelaksanaan,kontrol dan evaluasi.
8	Sudirman (2017)	PERAN KAUM MUDA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TANAMMAWANG	Dari hasil penelitian ditemukan bahwa peran kaum muda GENRETA dalam Pembangunan Desa Tanammawang mencakup dua hal yaitu sebagai kelompok pemberdayaan kaum muda dan sebagai agen perubahan.

### C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir